



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ANTISIPASI DAMPAK PENURUNAN KASUS COVID-19 DI BULAN RAMADAN

Efendi

Analisis Kebijakan Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Untuk kesekian kalinya, Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali untuk periode 5 hingga 18 April 2022. Kebijakan tersebut tertera dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan ini dikeluarkan karena Pemerintah menganggap kasus Covid-19 dengan varian omicron telah terkendali. Hal ini ditandai dengan jumlah kasus harian Covid-19 yang mengalami penurunan tajam hingga 97% dari puncak kasus Covid-19. Kasus aktif Covid-19 juga mengalami penurunan hingga 83% dari puncak kasus Covid-19 dan saat ini berada di bawah 100 ribu kasus. Selain itu, terjadi penurunan jumlah rawat inap di rumah sakit yang mencapai 85%. Jumlah kematian mengalami penurunan tajam hingga sekitar 88% dibandingkan dengan puncak kasus Covid-19. Tren penurunan kasus Covid-19 yang sangat tajam ini berdampak positif terhadap level asesmen kabupaten/kota. Hal ini ditandai dengan tidak ada lagi kabupaten/kota yang berada pada PPKM level 4.

Dampak positif dari penurunan kasus Covid-19 terlihat pada kebijakan Pemerintah yang memberikan kelonggaran kegiatan ibadah selama bulan Ramadan tahun ini. Meski demikian, Pemerintah tetap menegaskan beberapa poin penting dalam pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah. *Pertama*, kapasitas di tempat ibadah yang harus sesuai dengan kapasitas maksimal sesuai dengan level PPKM masing-masing kabupaten/kota. *Kedua*, kewajiban yang harus diperhatikan oleh pengelola dan pengurus tempat ibadah antara lain dengan menyediakan petugas untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan, memeriksa suhu tubuh setiap jamaah, menyediakan peralatan-peralatan lain untuk mendukung protokol kesehatan, mengawasi penggunaan masker bagi seluruh jamaah, serta mewajibkan jamaah untuk membawa peralatan ibadah masing-masing.

Terkendalnya penyebaran Covid-19 dan kebijakan pemberlakuan PPKM yang semakin membaik harus tetap diwaspadai dengan beberapa upaya antisipasi. Hal ini dikarenakan saat Ramadan, mobilitas dan aktifitas masyarakat yang cukup masif. Selain itu juga untuk mempertahankan pencapaian penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini. Langkah antisipasi terhadap peningkatan penyebaran Covid-19 perlu dilakukan Pemerintah dan masyarakat. *Pertama*, kelonggaran aktivitas masyarakat berbasis PPKM level 1 hingga level 3 harus terus diimbangi dengan penguatan pemeriksaan, pelacakan, dan pengobatan. Walaupun telah menunjukkan tren penurunan kasus, Pemerintah tetap harus meningkatkan pengetesan dan pelacakan kasus karena masih ada kemungkinan kembali memburuknya pandemi Covid-19.

Kedua, kelonggaran aktivitas tidak bisa sepenuhnya diartikan sebagai kebebasan sehingga nantinya akan berujung pada rendahnya penerapan protokol kesehatan. Oleh karenanya, Pemerintah terus meningkatkan sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. *Ketiga*, situasi pandemi yang terlihat membaik saat ini perlu dipertahankan meskipun ada ancaman kembali memburuknya pandemi. Oleh sebab itu, rumusan pengendalian pandemi Covid-19 yang belum berubah membutuhkan dukungan seluruh pihak. Di satu sisi, peran pemerintah sangat dibutuhkan, sementara di sisi lain peran setiap individu untuk terus menerapkan protokol kesehatan tentu sangat berarti.

Atensi DPR

Penurunan kasus Covid-19 saat ini dapat dikatakan sebagai prestasi yang cukup baik dari upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak termasuk Pemerintah dan masyarakat. Namun penurunan kasus ini terjadi pada saat memasuki bulan Ramadan di mana mobilitas dan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi dengan berbagai kegiatan peribadatan. Upaya pengawasan yang ketat masih tetap harus dilakukan untuk mencegah naiknya kasus Covid-19 di tengah masyarakat pada saat setelah Ramadan dan Idul Fitri. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan riset yang terukur dan terkontrol dalam membuat suatu kebijakan, terutama dalam menetapkan status perkembangan penyebaran Covid-19 pada masing-masing kabupaten/kota.

Sumber

Media Indonesia, 4 April 2022;
Republika, 5 April 2022.

Minggu ke-1 April
(1 s.d. 7 April 2022)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Nidya Waras Sayekti

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.